



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG PURWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **436749**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.505.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/250 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
2. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
3. Tanah Seluas 213 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/250 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 485 m2/485 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 672.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



4. MOBIL, HONDA WRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	338.482.398
F. HARTA LAINNYA	Rp.	750.000.000
Sub Total	Rp.	4.295.482.398
III. HUTANG	Rp.	200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.095.482.398

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.